

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah termasuk hak, kewenangan, serta tanggung jawab yang dimiliki oleh suatu daerah otonom untuk mengelola dan menyelenggarakan urusan pemerintahan serta memenuhi kebutuhan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Rosidin, 2015). Dengan diterapkannya sistem otonomi daerah, diharapkan setiap daerah bisa lebih mandiri dalam menentukan kebijakan dan menjalankan berbagai aktivitas pemerintahan tanpa ketergantungan yang berlebihan pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah diharapkan mampu menjalankan fungsinya secara optimal guna mendorong kemajuan wilayahnya, dengan tetap mempertanggungjawabkan kebijakan serta pelaksanaan tugasnya baik kepada masyarakat ataupun pemerintah pusat, sebagai bagian dari prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah mempunyai tujuan tersendiri untuk bisa mewujudkan pemerataan dalam pengelolaan sumber daya alam ataupun sumber daya manusia sehingga bisa memberi percepatan kesejahteraan sosial untuk rakyat yang ada di daerah (Kholik, 2020).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, khususnya pada Pasal 1 dan 2, kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kondisi di mana seluruh kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat sudah terpenuhi. Dengan pemenuhan kebutuhan tersebut, masyarakat diberdayakan untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menjalankan peran sosial yang sudah ditetapkan, yang mana pelaksanaan fungsi

tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah serta masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi pemberdayaan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan sosial. Dalam upaya meningkatkan kondisi kesejahteraan sosial bisa dilaksanakan melalui pemberian bantuan kepada individu untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan hidupnya. Untuk bisa mencapai sebuah kondisi sejahtera, seseorang harus berusaha dengan keras dan semaksimal mungkin agar menjadi sejahtera dengan cara intervensi sosial atau bisa dikatakan sebuah keadaan sejahtera tidak bisa tercapai apabila tidak diimbangi dengan usaha dan kerja keras dari individu, keluarga, ataupun kelompok masyarakat serta pemerintah. Dalam prosesnya tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat permasalahan yang dihadapi baik individu, kelompok masyarakat ataupun pemerintah. Menurut (Utara, 2015) tujuan pembangunan kesejahteraan sosial yang pertama dan utama ialah penanggulangan kemiskinan dalam segala bentuk manifestasinya. Hal itu termasuk juga dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengarusutamaan gender.

Isu gender kini menjadi fokus utama pemerintah, yang dibuktikan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Instruksi tersebut mengamanatkan agar seluruh menteri, pimpinan lembaga negara, dan kepala daerah mengintegrasikan aspek gender ke setiap tahap proses pembangunan. Upaya tersebut meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi program, kebijakan, serta kegiatan pembangunan di semua level mulai dari nasional hingga provinsi serta kabupaten/kota dalam berbagai sektor pembangunan. Berdasarkan data BPS pada tahun 2023 mengindikasikan jika Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jombang sebesar 90.65% pencapaian ini masih harus berjuang lagi untuk bisa

mencapai angka IPG 90.89 – 90.95 yang menjadi target pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Jawa Timur. Untuk mendorong pencapaian IKU IPG serta menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 maka di sahkannya Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengarustamaan Gender. Disamping itu, Kabupaten Jombang untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019, menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 tahun 2020 tentang pengarustamaan gender. Hal itu dikarenakan dalam rangka percepatan pengarustamaan gender dalam pembangunan di Kabupaten Jombang, maka diperlukannya Tindakan nyata dari Kabupaten Jombang dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, penganggaran serta evaluasi terhadap kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender.

Di Jawa Timur masih terdapat banyak penduduk kurang mampu baik di perkotaan ataupun di pedesaan. Tidak luput pula satunya Kabupaten Jombang yang berada di Provinsi Jawa Timur. Tingkat kesejahteraan masyarakat tiap individu di Kabupaten Jombang terdiri dari berbagai ragam. Kabupaten Jombang termasuk suatu kabupaten yang perkembangannya cukup diperhitungkan di Provinsi Jawa Timur, di Provinsi Jawa Timur sendiri, Kabupaten Jombang menduduki urutan ketiga dengan kinerja investasi terbaik (JOMBANG, 2021) . Hal tersebut menunjukkan Kabupaten Jombang Sebagai Kabupaten dengan tingkat pertumbuhan pembangunan yang dinilai progresif. Secara geografis letak Kabupaten Jombang yang cukup strategis menjadikan tujuan para investor baik luar negeri ataupun domestik. bisa diamati cukup banyak pabrik, dan pusat perbelanjaan di Kabupaten Jombang. Bersama dengan hal tersebut, pembangunan di Kabupaten

Jombang juga ditingkatkan dalam rangka mewujudkan pembangunan merata di Kabupaten Jombang serta akses perindustrian dan perdagangan yang layak. Mengamati pertumbuhan industri, perdagangan, dan investasi di Kabupaten Jombang seperti dijelaskan diatas pembangunan infrastruktur juga menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Jombang dalam menunjang kesejahteraan masyarakat. Dengan berbagai perkembangan dan kemajuan Kabupaten Jombang dari sisi perekonomian dan investasi tentu berdampak terhadap dinamika dan masalah – masalah masyarakat Kabupaten Jombang, berdasarkan data dari BPS hasil sensus penduduk 2024 jumlah penduduk Kabupaten Jombang 1.370.510 jiwa. Dengan rincian dalam tabel berikut.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Laki-Laki Dan Perempuan Di Kabupaten Jombang

No.	Tahun	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1.	2019	692.940	683.401	1.376.341
2.	2020	664.605	653.457	1.318.062
3.	2022	685.510	674.351	1.359.861
5.	2023	690.361	680.149	1.370.510

Sumber: (BPS, 2023)

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa tidak terdapat perbedaan jauh antara jumlah laki-laki dan perempuan, bahkan jumlah perempuan hampir mendekati jumlah laki - laki. Dengan jumlah penduduk yang demikian tidak terkecuali terdapat permasalahan gender dan segala seluk – beluk dinamika didalamnya yang juga menjadi masalah Kabupaten Jombang. Di jombang sendiri Indeks Pembangunan Gender (IPG) berdasarkan data dari BPS terbaru tahun 2023

nilainya 90,65% yang artinya berada dibawah rata – rata Jawa Timur sebesar 92,15% dengan indikator perempuan Jombang sangat aktif disegala bidang seperti ekonomi, sosial, dan budaya.

Masalah – masalah gender muncul akibat dari pengaruh kemajuan dan perkembangan sebuah daerah itu sendiri seperti halnya semakin bertambahnya penduduk musiman, pemukiman urban, dan lain sejenisnya yang memunculkan masalah – masalah lain, disamping peran aktif perempuan juga dibutuhkan disegala aspek dan sektor dalam rangka optimalisasi pembangunan di daerah, dalam hal itu khususnya pemerintah Kabupaten Jombang. Beberapa permasalahan yang kerap muncul di berbagai daerah berkaitan dengan ketidakadilan gender, yang bisa diwujudkan dalam beberapa bentuk. Suatunya ialah subordinasi, yakni pandangan atau persepsi yang menganggap bahwa peran yang dijalankan oleh satu jenis kelamin mempunyai kedudukan lebih rendah dibanding dengan jenis kelamin lainnya. Disamping itu, terdapat pula marginalisasi, yang merujuk pada tindakan mengucilkan, menyingkirkan, atau melemahkan posisi kelompok minoritas dalam berbagai aspek, terutama yang berkaitan dengan kepentingan negara serta dominasi kelompok mayoritas, serta beban ganda (termasuk masalah domestifikasi pekerjaan perempuan), kekerasan atau penganiayaan, dan *stereotype*. Disamping itu, masalah kultur dengan berbagai macam anggapan atau persepsi seperti, perempuan tidak perlu sekolah terlalu tinggi, atau perempuan hanya perlu memperkaya kemampuan memasak, merias diri dan menemani pasangan, tidak bisa dipungkiri juga masih muncul didaerah – daerah, tidak terkecuali di Kabupaten Jombang. Maka, ketidakadilan gender tersebut harus diminimalisir bahkan dihapuskan dalam kehidupan sehari – hari masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender

yang baik, sehingga proses pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah bisa berjalan dengan baik dengan partisipasi gender yang seimbang. Melaksanakan pembangunan dengan mengintegrasikan prinsip keadilan gender termasuk prasyarat penting untuk mencapai hasil yang benar-benar seimbang, di mana manfaat pembangunan dirasakan secara merata oleh semua, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Status pembangunan gender di Jombang berdasarkan data yang disajikan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur menunjukkan angka IPG (Indeks Pembangunan Gender) dengan komponen pembentuk antara lain angka dan indeks harapan hidup, angka dan indeks melek huruf atau buta aksara, angka dan indeks rata – rata lama sekolah. Adapun perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Jombang selama beberapa tahun terakhir ialah seperti berikut:

Tabel 1.2 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2023

No.	Tahun	IPG (%)
1.	2017	89.91
2.	2018	89.94
3.	2019	90.37
4.	2020	90.15
5.	2021	90.23
6.	2022	90,51
7.	2023	90,65

Sumber: (BPS, 2021)

Dari data tabel diatas menunjukkan status perkembangan pembangunan gender di Kabupaten Jombang selama beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup baik dengan komponen pembentuk partisipasi gender diberbagai sektor dan bidang. Hal itu berarti partisipasi gender di Kabupaten Jombang menurut data yang sudah disajikan diatas ialah cukup, sebanding dengan perkembangan capaian Indeks Pembangunan Gender di Jawa Timur hingga saat ini berada pada angkat 90,65% pada tahun 2023. Berdasarkan data tersebut meskipun Indeks Pembangunan Gender dinilai cukup, bukan berarti tugas pemerintah selesai. Masalah gender termasuk permasalahan yang berlanjutan yang selalu muncul akibat dampak kebijakan, perkembangan perekonomian, dan masalah – masalah lainnya. Maka hal itu harus menjadi fokus dan konsentrasi tersendiri bagi pemerintah.

Program pemberdayaan terutama pemberdayaan berbasis ketimpangan gender tanpa analisis gender akan menghasilkan program yang bias gender sehingga dianggap belum menguntungkan bagi perempuan secara utuh, hal itu hanya mendorong perempuan untuk segera keluar di ruang publik namun masih belum sampai memahami cara penjangkauan akses, partisipasi aktif, mendapatkan manfaat dan mempunyai kemampuan untuk membuat keputusan atau kontrol agar mempunyai posisi yang setara. Untuk itu Program Sekolah Perempuan Berdayakan Lindungi Perempuan Dan Anak, yang selanjutnya penyebutannya dalam skripsi ini akan disingkat menjadi Program SEKOPER BERLIAN sudah dirancang sebagai suatu upaya peningkatan kemampuan atau keberdayaan perempuan ditingkat akar rumput terutama perempuan yang masih mengalami kemiskinan. Strategi intervensi bisa berbentuk pemberdayaan ekonomi, kepemimpinan, penanggulangan

kekerasan, kesejahteraan keluarga, kesehatan keluarga dan lainnya. Program SEKOPER BERLIAN dilaksanakan bukan dalam bentuk programatik melainkan terintegrasi, bersifat jangka Panjang, mengutamakan peran kemitraan serta kolaborasi berbagai pihak, Mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi dan memahami kondisi lingkungan sekitar, serta mengkomunikasikannya dalam berbagai aspek proses pembangunan. Disamping itu, mampu mengekspresikan aspirasi pribadi, harapan keluarga, hingga visi ideal terhadap masyarakat yang diimpikan. Kemampuan perempuan perlu ditingkatkan melalui wadah Program SEKOPER BERLIAN yang mengubah kesadaran naif menjadi kesadaran kritis perempuan yang termasuk konsep pendidikan non-formal yang tidak pernah atau jarang didapatkan, agar bisa memanfaatkan potensi yang dimiliki, lingkungan, berbagai perubahan dan program pembangunan secara baik, perlu mendapatkan pendidikan. Berdasarkan pengalaman di beberapa tempat yang mengembangkan sekolah perempuan di Desa, mengindikasikan jika perempuan mempunyai kemampuan diri yang baik, wawasan bisa berkembang, potensi diri bisa tergali, kemampuan berperan menjadi lebih besar, sehingga bisa membangun kepercayaan diri, melihat potensi disekitar serta membangun gagasan inovatif untuk berperan besar dalam pembangunan di Desa. Kesempatan yang diberikan bisa menjadi peluang untuk kemajuan keluarga dan masyarakat serta bisa menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Untuk membangun kekuatan ini maka perlu penguatan, pemberdayaan, pendidikan agar bisa mengembangkan potensi diri menjadi kekuatan pembangunan untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Perempuan termasuk bentuk asset, investasi dan potensi negara yang mempunyai kontribusi cukup besar bagi kehidupan berbangsa dan negara sesuai dengan keahlian dan potensinya. Karena hal tersebut

dilaksanakan pemberdayaan perempuan untuk memberi edukasi, pelatihan serta bimbingan kepada perempuan/ibu ibu di desa dengan harapan, perempuan akan menjadi lebih mandiri dan bisa mendukung perekonomian keluarga. Dalam program Sekolah Perempuan Berdayakan Lindungi Perempuan dan Anak (SEKOPER BERLIAN), perempuan desa diberikan edukasi dan pelatihan – pelatihan. Dalam program SEKOPER BERLIAN terdapat 5 materi yang disampaikan, diantaranya pertama partisipasi pendidikan adil gender, kedua membangun kepercayaan diri, ketiga reproduksi sehat, keempat membangun kemampuan pribadi dan ekonomi mandiri, kelima kemampuan berorganisasi. Dari kelima kegiatan/materi tersebut, membangun kemampuan pribadi dan ekonomi mandiri termasuk penyampaian materi yang paling diutamakan dalam program ini. Di Kabupaten Jombang, program ini dilaksanakan di Desa Tampingmojo dan Desa Pesantren Kecamatan Tembelang, dan Desa Tambakrejo kecamatan Jombang. Kajian ini dilaksanakan di Desa Tambakrejo kecamatan Jombang berdasarkan arahan dari staf Dinas DPPKB PPPA Kabupaten Jombang serta termasuk sekolah perempuan pertama dibentuk di Desa tersebut.

Program SEKOPER BERLIAN sudah berjalan sejak tahun 2020 dan berhasil menjadi suatu program yang mengan tarkan Kabupaten Jombang meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE).



Gambar 1.1 Bupati Jombang menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Republik Indonesia mengakui upaya dan prestasi Kabupaten Jombang dengan menganugerahkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dalam kategori utama. Penghargaan APE sendiri termasuk bentuk apresiasi terhadap inisiatif dan pencapaian yang berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam aspek perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, serta kesetaraan gender di wilayah daerah. Karena pandemi masih berlangsung, prosesi penyerahan penghargaan dilaksanakan secara simbolis melalui pertemuan virtual pada tanggal 13 Oktober 2021, meskipun trofi penghargaan sudah disalurkan secara langsung ke masing-masing kabupaten/kota. Pencapaian dalam implementasi program SEKOPER BERLIAN ini tidak lepas dari peran dari berbagai pihak yang terlibat dalam Program Sekolah Perempuan Berdayakan Lindungi Perempuan dan Anak (SEKOPER BERLIAN) selama proses implementasi kebijakan program.

Berdasarkan penjabaran diatas penulis mengansumsikan bahwa program SEKOPER BERLIAN di Kabupaten Jombang berhasil diimplementasikan kepada

masyarakat khususnya perempuan desa sehingga bisa mengantarkan Kabupaten Jombang mendapatkan penghargaan APE. Dalam (Purwanto & Sulistyastuti, 2015) juga menyampaikan bahwa terdapat enam faktor utama yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan. Faktor pertama ialah kualitas kebijakan itu sendiri. Di sini, kualitas mencakup beberapa aspek, seperti kejelasan tujuan yang ingin dicapai, penetapan secara jelas siapa saja implementor atau pihak yang bertanggung jawab, serta penunjukan penanggung jawab atas pelaksanaan. Dengan kata lain, mutu suatu kebijakan sangat bergantung pada bagaimana proses perumusannya dilaksanakan sejak awal. Peluang terciptanya kebijakan yang berkualitas akan tercapai ketika suatu kebijakan dirumuskan secara demokratis. Suatu hal yang terlihat pada program SEKOPER BERLIAN yakni adanya kejelasan implementor yakni adanya struktur organisasi. Kedua, kecukupan input kegiatan, tanpa dukungan anggaran yang memadai suatu kebijakan atau program tidak akan mencapai tujuan atau sasaran. Dalam program SEKOPER BERLIAN anggaran berasal dari APBN, APBD Kabupaten Jombang, APBD Desa, serta sumbangan pihak swasta. Ketiga, keberhasilan dalam mencapai sasaran kebijakan sangat bergantung pada keakuratan instrumen yang digunakan. Demikian pula, setiap permasalahan publik yang hendak dipecahkan melalui kebijakan memerlukan pemilihan instrumen yang tepat guna mengoptimalkan hasil yang diinginkan. Penjelasan instrumen termasuk alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Dalam SEKOPER BERLIAN untuk membantu pelaksanaan kegiatan pada materi membangun kemampuan pribadi dan ekonomi mandiri agar bisa tercapai tujuannya, contohnya dalam pengajaran pembuatan produk makanan, maka akan disiapkan alat dan bahan untuk memasak. Keempat, kapasitas implementor,

struktur organisasi yang terlalu hirarki tentu akan menghambat proses implementasi. Dalam program SEKOPER BERLIAN terlihat pada adanya pelatihan terhadap fasilitator. Kelima, faktor-faktor yang berkaitan dengan sifat dan bentuk dukungan yang diberikan oleh kelompok sasaran memainkan peranan penting, karena karakteristik unik dari kelompok tersebut akan sangat menentukan sejauh mana dukungan mereka terhadap proses implementasi. Pada program SEKOPER BERLIAN terlihat dari adanya dukungan masyarakat dengan ikut serta berpartisipasi sebagai peserta program SEKOPER BERLIAN. Keenam, situasi sosial ekonomi di lingkungan tempat pelaksanaan implementasi tersebut berlangsung. Pada program SEKOPER BERLIAN situasi dan kondisi lingkungan sosial ekonomi masyarakat di desa kondusif untuk dilaksanakan dalam upaya pencapaian tujuan kebijakan.

Dari pendapat tersebut, bisa diketahui bahwa terdapat banyak aspek untuk menentukan berhasil atau tidaknya sebuah implementasi kebijakan pemerintah, begitupula dalam implementasi program SEKOPER BERLIAN ini.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas penulis tertarik untuk membahas mengenai “Implementasi Program Sekolah Perempuan Berdayakan Lindungi Perempuan dan Anak (SEKOPER BERLIAN) di Desa Tambakrejo Jombang”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang sudah dipaparkan. Maka rumusan masalah dari kajian ini yakni: Bagaimana Implementasi Program Sekolah Perempuan Berdayakan Lindungi Perempuan dan Anak (SEKOPER BERLIAN) di Desa Tambakrejo Jombang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari kajian ini ialah untuk mendeskripsikan Implementasi Program Sekolah Perempuan Berdayakan Lindungi Perempuan dan Anak (SEKOPER BERLIAN) di Desa Tambakrejo Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

Mengacu pada sasaran penelitian yang sudah diuraikan di atas, kajian ini diharapkan bisa menyumbangkan manfaat yang luas dan beragam bagi berbagai pihak, seperti berikut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Studi ini diharapkan bisa memperluas pemahaman mengenai konsep-konsep kebijakan yang dirancang untuk mencapai target peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi penduduk di wilayah pedesaan. Disamping itu, hasil kajian ini diantisipasi bisa berfungsi sebagai referensi dasar yang berguna untuk penelitian lanjutan, terutama yang fokus pada evaluasi dan implementasi program pemberdayaan masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Masyarakat

Masyarakat bisa memperdalam wawasan tentang implementasi suatu program pemberdayaan yakni program Sekolah Perempuan Berdayakan Lindungan Perempuan dan Anak (SEKOPER BERLIAN) dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa.

1.4.2.2 Bagi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Kajian ini bisa dimanfaatkan oleh Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sebagai suatu referensi dalam mendukung proses

pembelajaran. Disamping itu, hasil kajian ini juga bisa dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang ingin melaksanakan studi serupa di masa mendatang. Lebih lanjut, kajian ini berperan sebagai acuan akademik yang bisa berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan universitas.

1.4.2.3 Bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang.

Kajian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi serta acuan pengembangan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, serta Perlindungan Anak Kabupaten Jombang. Disamping itu, hasil kajian ini juga bisa memberi masukan kepada Dinas Sosial Kabupaten Jombang dalam merumuskan strategi yang lebih efektif terkait program SEKOPER BERLIAN, sehingga program pemberdayaan tersebut bisa terus berkembang dan memberi manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat Kabupaten Jombang di masa mendatang.